

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI TENAGA
KERJA INDONESIA (TKI) DI TAIWAN
(KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA SEBAGAI SEBUAH
KEDUTAAN BESAR *DE FACTO* DALAM KETIADAAN HUBUNGAN
DIPLOMATIK)**

Oleh

Siti Safa'ati Rohmah, NIM 1814101036

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait (1) bentuk pengaturan penganiayaan yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan faktor-faktor penyebab penganiayaan terus dilakukan kemudian (2) peran pemerintah dalam upaya perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan studi kasus, dan pendekatan konseptual. Adapun Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Taiwan rentan mengalami penganiayaan. Faktor pendorong pelanggaran terhadap hak Tenaga Kerja Indonesia terus dilakukan adalah implikasi kebijakan *One China Policy* yang mengakibatkan ketiadaan hubungan diplomatik formal dan menjadikan lemahnya perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia. (2) Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia melalui KDEI adalah dengan melaksanakan fungsi konsuler dengan baik. aktif melakukan pendampingan terhadap TKI yang bermasalah, menyediakan layanan aduan, memberikan bantuan hukum dan bantuan kemanusiaan, pelayanan administrasi seperti legalisasi dokumen, perpanjangan paspor dan visa. Meskipun KDEI bukan perwakilan diplomatik formal akan tetapi KDEI selalu mengupayakan perlindungan kepentingan seluruh WNI di Taiwan dengan sebaik-baiknya.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Negara, Perlindungan TKI, KDEI.

**STATE RESPONSIBILITY IN PROTECTING INDONESIAN WORKERS
(TKI) IN TAIWAN
(THE INDONESIAN ECONOMIC AND TRADE OFFICE FUNCTIONS AS A
DE FACTO EMBASSY IN THE ABSENCE OF DIPLOMATIC RELATIONS)**

By

Siti Safa'ati Rohmah, NIM 1814101036

Legal Study Program

ABSTRACT

The purpose of the research is to find out and analyze (1) Forms of abuse experienced by Indonesian Workers in Taiwan and the factors that contributing to their continued occurrence, and then (2) The role of the government in providing legal protection for Indonesian Workers in Taiwan through the Indonesian Economic and Trade Office. The type of research used is normative legal research using a statute approach, case study approach, and a conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials used literature study technique and analyzed by descriptive technique. The results of the research show that (1) Indonesian Workers in Taiwan are vulnerable to abuse. The driving factor for the continued violation of Indonesian Workers Rights of the impact of the One China Policy which results in the absence of formal diplomatic relations and weakens their legal protection (2) The role of the Government in legal protection efforts for Indonesian Workers through IETO is to carry out consular functions properly. Actively provide assistance to Indonesian Workers who have problems, provide complaint services, providing legal aid and humanitarian assistance, administrative services such as document legalization, passport and visa extension. Although IETO is not a formal representative IETO always strives to protect the interests of all Indonesian citizens in Taiwan as best as possible.

Keyword : *State Responsibility, Protection of Indonesian Workers, IETO.*